



## Digital Receipt

This receipt acknowledges that **Turnitin** received your paper. Below you will find the receipt information regarding your submission.

The first page of your submissions is displayed below.

Submission author: **Tjipto Susana**  
Assignment title: **Periksa similarity**  
Submission title: **Identitas Global : Membangun Kesa..**  
File name: **Identitas\_Global\_Membangun\_Kes...**  
File size: **763.22K**  
Page count: **10**  
Word count: **4,681**  
Character count: **30,865**  
Submission date: **12-Feb-2019 10:34AM (UTC+0700)**  
Submission ID: **1076777618**

Jurnal Psikologi Indonesia  
2008, No. 1, 80-89, ISSN: 0853-3098

Himpunan Psikologi Indonesia

### IDENTITAS GLOBAL: MEMBANGUN KESAMAAN TANPA MENYERAGAMKAN

(GLOBAL IDENTITY: BUILDING SIMILARITY WITHOUT MAKING  
UNIFORMITY)

**Tjipto Susana**  
Universitas Sanata Dharma  
Mahasiswa Program Doktor Ilmu Psikologi Universitas Gadjah Mada

Konflik antar suku, agama, dan golongan serta tindakan kekerasan di Indonesia bukanlah hal baru. Berdasarkan kajian terhadap hasil-hasil penelitian maupun pemikiran para ahli dapat disimpulkan bahwa konflik-konflik tersebut berakar dari keinginan setiap kelompok untuk menunjukkan eksistensinya. Solidaritas, harmoni, dan toleransi tumbuh subur di dalam kelompok (in-group), tetapi tidak terhadap orang-orang di luar kelompoknya (out-group). Keragaman kelompok secara menyeluruh potensial menciptakan konflik, intoleransi, dan disharmoni. Identifikasi berlebihan terhadap sebuah entitas yang unik seperti kesukuan, kepartaian, ataupun keagamaan merupakan hambatan besar menuju pada identitas Indonesia yang baru. Upaya penyeragaman pada zaman Orde Baru dengan kekuasaan absolutnya di satu sisi memang meredakan konflik tetapi di sisi lain, mematikan pluralisme. Menggunakan kerangka berpikir Arrow dan Sundberg (2004) tentang identitas internasional, penulis berpendapat bahwa cukup mengembangkan identitas nasional. Perlu pengembangan identitas yang lebih luas, yaitu identitas Global atau Global-Human Identity atau World-Mindedness. Identitas global merupakan identifikasi terhadap semua orang di dunia melampaui batas-batas kesukuan, keagamaan, kebangsaan, pemerintahan, atau ikatan personal. Dengan demikian tidak ada lagi batas antara in-group dan out-group. Secara esensial setiap orang akan dipertalikan dengan orang lain sebagai manusia (as a human being) dan oleh perasaan kemanusiaannya (in his/her humanity). Sehingga setiap orang akan mengembangkan sikap hormat dan toleransi yang luas. Perbedaan akan dihayati sebagai kebenaran paradoks. Dengan demikian Bhinneka Tunggal Ika bukanlah sekadar semboyan penghisap Bangsa.

**Kata kunci:** konflik, identitas nasional, identitas internasional, identitas global, in-group, out-group

*Inter-ethnic, inter-religious, as well as inter-group conflicts are not new in Indonesia. A review of both relevant studies and theories reveals that those conflicts were rooted in the groups' need to assert their existence. Solidarity, harmony, and tolerance are thriving within a group (in-group), and not towards those outside the group (out-group). Group diversity has the potential of creating conflicts, intolerance, and disharmony. Excessive identification to a certain unique entity such as ethnicity, as well as political or religious affiliations may pose a serious barrier towards a new Indonesian identity. The act of making everything uniform in the era of the New Order with its almost absolute power had resulted in the attenuation of conflicts on the one hand, but at the same time it had put pluralism out on the other. Based on Arrow and Sundberg's (2004) theoretical framework of international identity, the present writer contends that it does not suffice to just building a National identity. We need to develop a broader identity, namely a Global identity or a Global-Human Identity or a World-Mindedness. A global identity is the identification to everyone in the world beyond any borders of ethnicity, religion, nationality, country, or personal affiliation. Hence, there would be no more borders between in-group and out-group. Everyone would essentially be unified with everyone else as a human being as well as in her or his humanity. Hence, everyone would show a broad respect and tolerance. Any difference would be accepted as a paradoxical truth. Thus, Bhinneka Tunggal Ika or unity-in-diversity would no longer serve merely as the Nation's lip service.*

**Keywords:** conflict, national identity, international identity, global identity, in-group, out-group

# Identitas Global : Membangun Kesamaan Tanpa Menyeragamkan

*by* Susana Tjipto

---

**Submission date:** 12-Feb-2019 10:34AM (UTC+0700)

**Submission ID:** 1076777618

**File name:** Identitas\_Global\_Membangun\_Kesamaan\_Tanpa\_Menyeragamkan.pdf (763.22K)

**Word count:** 4681

**Character count:** 30865

## IDENTITAS GLOBAL: MEMBANGUN KESAMAAN TANPA MENYERAGAMKAN

(GLOBAL IDENTITY: BUILDING SIMILARITY WITHOUT MAKING  
UNIFORMITY)

20

Tjipto Susana

Universitas Sanata Dharma

Mahasiswa Program Doktor Ilmu Psikologi Universitas Gadjah Mada

Konflik antar suku, agama, dan golongan serta tindakan kekerasan di Indonesia bukanlah hal baru. Berdasarkan kajian terhadap hasil-hasil penelitian maupun pemikiran para ahli dapat disimpulkan bahwa konflik-konflik tersebut berakar dari keinginan setiap kelompok untuk menunjukkan eksistensinya. Solidaritas, harmoni, dan toleransi tumbuh subur di dalam kelompok (*in-group*), tetapi tidak terhadap orang-orang di luar kelompoknya (*out-group*). Keragaman kelompok secara menyeluruh potensial menciptakan konflik, intoleransi, dan disharmoni. Identifikasi berlebihan terhadap sebuah entitas yang unik seperti kesukuan, kepertaian, ataupun keagamaan merupakan hambatan besar menuju pada identitas Indonesia yang baru. Upaya penyeragaman pada zaman Orde Baru dengan kekuasaan absolutnya di satu sisi memang meredam konflik tetapi di sisi lain, mematikan pluralisme. Menggunakan kerangka berpikir Arrow dan Sundberg (2004) tentang Identitas Internasional, penulis berpendapat tidaklah cukup mengembangkan Identitas Nasional. Perlu pengembangan identitas yang lebih luas, yaitu Identitas Global atau *Global-Human Identity* atau *World-Mindedness*. Identitas global merupakan identifikasi terhadap semua orang di dunia melampaui batas-batas kesukuan, keagamaan, kebangsaan, kenegaraan, atau ikatan personal. Dengan demikian tidak ada lagi batas antara *in group* dan *out group*. Secara esensial setiap orang akan dipersatukan dengan orang lain sebagai manusia (*as a human being*) dan oleh perasaan kemanusiaannya (*in his/her humanity*). Sehingga setiap orang akan mengembangkan sikap hormat dan toleransi yang luas. Perbedaan akan dihayati sebagai kebenaran paradoks. Dengan demikian Bhinneka Tunggal Ika bukanlah sekadar semboyan penghias Bangsa.

**Kata kunci:** konflik, identitas nasional, identitas internasional, identitas global, *in group*, *out group*.

*Inter-ethnic, inter-religious, as well as inter-group conflicts are not new in Indonesia. A review of both relevant studies and theories reveals that those conflicts were rooted in the groups' need to assert their existence. Solidarity, harmony, and tolerance are thriving within a group (in-group), and not towards those outside the group (out-group). Group diversity has the potential of creating conflicts, intolerance, and disharmony. Excessive identification to a certain unique entity such as ethnicity, as well as political or religious affiliations may pose a serious barrier towards a new Indonesian identity. The act of making everything uniform in the era of the 27<sup>th</sup> Order with its almost absolute power had resulted in the attenuation of conflicts on the one hand, but at the same time it had put pluralism out on the other. Based on Arrow and Sundberg's (2004) theoretical framework of International Identity, the present writer contends that it does not suffice to just building a National Identity. We need to develop a broader identity, namely a Global Identity or a Global Human Identity or a World-Mindedness. A global identity is the identification to everyone in the world beyond any borders of ethnicity, religion, nationality, country, or personal affiliation. Hence, there would be no more borders between in-group and out-group. Everyone would essentially be unified with everyone else as a human being as well as in her or his humanity. Hence, everyone would show a broad respect and tolerance. Any difference would be accepted as a paradoxical truth. Thus, Bhinneka Tunggal Ika or unity-in-diversity would no longer serve merely as the Nation's lip service.*

**Keywords:** conflict, national identity, international identity, global identity, *in group*, *out group*.

Kemelut di Indonesia yang sebagian besar diwarnai konflik serasa tak kunjung padam. Sejak diproklamasikannya kemerdekaan Indonesia, terutama sejak naiknya pemerintahan Orde Baru, Indonesia terus-menerus didera konflik dan tindakan kekerasan baik yang bersifat vertikal maupun horisontal.

<sup>26</sup> Konflik vertikal sudah terjadi semenjak Belanda mengakui kedaulatan Indonesia, pada tanggal 27 Desember 1949 (Silalahi, 2004<sup>a</sup>). Bentrokan terjadi antara Angkatan Perang Republik Indonesia Serikat (APRIS) dengan orang-orang bekas tentara KNIL asal Ambon yang tidak bersedia bergabung dengan Tentara Nasional Indonesia sebagai pasukan inti APRIS. Pada tanggal 25 April 1950, mereka memproklamasikan Republik Maluku Selatan (RMS), dengan presiden Dr. Chr. R. S. Soumokil, bekas jaksa agung Negara Indonesia Timur. Proklamasi RMS tersebut memicu konflik berkelanjutan, yang berlangsung sampai saat ini, dan diwarnai pula oleh konflik horisontal, yaitu antara umat Islam dan Kristen.

Konflik vertikal lainnya, antara lain pemadaman pemberontakan petani di Lampung pada bulan Februari 1989 oleh Angkatan Darat; penyerbuan tentara pendudukan Indonesia terhadap pro-kemerdekaan di Santa Cruz, Dili, Timor Timur; akhir tahun 1994 dan awal 1995 bentrokan antara masyarakat Papua dan TNI; penyerbuan markas Partai Demokrasi Indonesia yang anti Suharto, pada tanggal 27 Juli 1996 (Wardaya, 2006); dan konflik berkepanjangan selama 30 tahun antara Pemerintah Republik Indonesia dengan Gerakan Aceh Merdeka (GAM) ("Laporan hasil", 2005).

Konflik horisontal seperti Kerusuhan anti-Cina sudah dimulai sejak tahun 1963, yaitu kerusuhan yang dipicu oleh keributan antara mahasiswa pribumi dan non-pribumi di kampus Institut Teknologi Bandung ("Mencari solusi", 2001).

Kerusuhan serupa terjadi di Pekalongan (tahun 1972), Palu (tahun 1973), Ujung Pandang, Medan, Solo (tahun 1980), Surabaya (tahun 1986), Purwakarta (tahun 1995), Jakarta, Medan, Solo (1998), dan terakhir di Makasar pada tahun 2006, yaitu kerusuhan anti-Cina yang disulut oleh kasus

pembantu yang dianiaya atau dihamili oleh majikan yang kebetulan Cina ("Mencari solusi", 2001; Subianto, 2007).

Konflik etnis lainnya, yaitu antara suku Dayak dan Madura di Kalimantan. Pada tanggal 30 Desember 1996 suku Dayak Sanggauledo, Kalimantan Barat menyerang dan membakar perkampungan Madura ("Mencari solusi", 2001). Ratusan orang tewas dan ribuan orang Madura diungsikan. Konflik tersebut mencuat lagi di Sampit, Kalimantan Tengah, pada tanggal 18 Februari 2001 yang dipicu oleh peristiwa pembunuhan empat anggota keluarga Madura-Matayo ("Darimana datangnya", 2004).

Konflik horisontal lainnya adalah konflik antar umat beragama. Pada tahun 1998, konflik yang awalnya berupa bentrokan antara warga Desa Waitele dan Hative Besar, Ambon, akhirnya berbuntut sentimen keagamaan, yaitu antara umat Islam dan Kristen ("Darimana Datangnya", Manan, 2004). Di tahun yang sama (1998), di Poso terjadi pula konflik yang merupakan awal dari konflik antar agama yang berkepanjangan sampai sekarang (Silalahi, 2004). Konflik tersebut sebenarnya dilandasi oleh berbagai motif, mulai dari pemuda mabuk sampai dengan masalah politis.

Melihat peristiwa kekerasan dan konflik yang terjadi di negeri ini, timbullah suatu kemasgulan, mengapa Bangsa Indonesia yang dikenal sebagai Bangsa yang ramah, yang menjunjung tinggi nilai-nilai toleransi dan harmoni, justru sarat dengan konflik dan tindakan kekerasan? Apakah keragaman budaya, suku, dan agama di Indonesia merupakan ancaman bagi persatuan, kesatuan, dan perdamaian di Indonesia? Tidak adakah cara menyikapi perbedaan menjadi sinergi untuk membangun kebersamaan dan perdamaian? Tulisan ini bermaksud menyajikan potret akar permasalahan.

### **Orientasi Budaya Kolektif: Harmoni dan Solidaritas dalam Kelompok**

Belajar dari konflik-konflik yang terjadi di bumi pertiwi ini dapat dilihat bahwa konflik antar pribadi dapat berkembang menjadi konflik antar kelompok, dan akhirnya merebak di seluruh wilayah tanah air sebagai wujud



solidaritas terhadap masing-masing kelompok yang sedang bertikai. Misalnya kasus konflik berkepanjangan di Poso. Pertikaian yang diwarnai sentimen keagamaan, bermula dari peristiwa pembacokan terhadap Ridwan (Muslim) yang sedang berada di sebuah masjid oleh Roy Runtu (Kristen) dalam kondisi mabuk, pada bulan Desember 1998 (Silalahi, 2004<sup>b</sup>). Keduanya mengadu ke kelompok masing-masing, yang akhirnya konflik tersebut berkembang menjadi pertikaian antara kelompok Islam dan Kristen. Rasa solidaritas yang berbasis keagamaan merebak pula sampai ke daerah lain. Misalnya baru-baru ini, yaitu pada tanggal 29 Januari 2007, puluhan personil mantan anggota Laskar Jih<sup>17</sup> dilaporkan telah meninggalkan Surabaya untuk bergerak ke Poso, Sulawesi Tengah dengan menggunakan kapal yang berbeda-beda ("Puluhan eks", 2007). Enam personil sebagai pimpinan Laskar Jihad tersebut berasal dari Solo dan Yogyakarta.

Demikian halnya pada kasus-kasus kerusuhan dan kekerasan yang dilatarbelakangi oleh sikap anti Cina. Biasanya kerusuhan diawali oleh pertikaian antar kelompok atau antar pribadi yang kebetulan keduanya berasal dari etnis Cina (non-pri) dan pribumi. Misalnya saja kerusuhan besar yang terjadi di Bandung pada tanggal 10 Mei 1963, diawali dengan keributan yang terjadi antara mahasiswa pribumi dan non-pribumi di Institut Teknologi Bandung Cina ("Mencari solusi", 2001). Keributan berubah menjadi kerusuhan yang menjalar sampai ke Yogyakarta, Malang, Surabaya, dan Medan. Kerusuhan serupa juga terjadi pada tanggal 20 November 1980 yang bermula dari perkelahian Pipit Suryadi dan Kicak (seorang pemuda <sup>21</sup> itu peranakan Cina) di Solo, yang akhirnya berubah menjadi pengrusakan dan pembakaran toko-toko milik orang-orang Cina. Kerusuhan ini merembet sampai ke kota-kota lain di Jawa Tengah.

Dari contoh-contoh kasus tersebut, nampak bahwa ada solidaritas yang tinggi di antara orang-orang yang merasa dirinya berasal dari kelompok yang sama. Ada pelekatan pribadi pada identitas sosial, baik yang berasal dari kelompok etnis Cina dan pribumi maupun kelompok Islam dan Kristen. Ikatan yang sangat kuat pada identitas kelompok ini menyebabkan setiap individu menempatkan

status kehormatan di atas harga diri pribadi (Hofstede & Hofstede, 2005; Triandis, 1994). Reputasi pribadi biasanya diekspresikan dalam bentuk reputasi kelompok. Jadi ada kesalingtergantungan antara kehormatan pribadi dan kelompok: reputasi kelompok mencerminkan reputasi pribadi, sementara kehormatan kelompok dibangun dari tiap anggotanya. Mempertahankan nama baik kelompok adalah kewajiban tiap anggotanya. Oleh karena itu kedua belah pihak bertikai dengan dasar mempertahankan dan membela kehormatan kelompoknya masing-masing. Inilah yang disebut sebagai orientasi budaya kolektif atau kolektivisme (Hofstede & Hofstede, 2005; Triandis, 1994, 1999). Kolektivisme merupakan orientasi budaya yang ikatan antar individunya kuat, kohesif, yang seluruh kehidupan orang-orang yang terlibat di dalamnya secara terus-menerus memelihara ikatan ini dalam relasi kesetiaan yang tak bisa diragukan lagi (Hofstede & Hofstede, 2005). Oleh karena itu sangatlah dapat dipahami mengapa konflik yang diwarnai sentimen keagamaan atau rasial cepat merebak ke seluruh wilayah Tanah Air dan memunculkan solidaritas dari orang-orang yang merasa mempunyai identitas sosial yang sama.

Ciri kolektivisme lainnya adalah kecenderungan setiap orang untuk lebih menjaga harmoni kelompoknya (*in-group*), lebih menunjukkan toleransi, kerelaan berbagi, dan solidaritas kepada kelompoknya dibandingkan terhadap orang-orang di luar kelompoknya (*out-group*; Triandis, Bontempo, & Villarael, 1988). Dengan demikian setiap orang tidak mempunyai kewajiban menghindari konflik dan menjaga harmoni terhadap orang-orang di luar kelompoknya. Oleh karena itu jika terdapat banyak kelompok, maka secara menyeluruh, masyarakat akan mengalami disharmoni dan kondisi ketidakrelaan untuk berbagi.

Kasus pelanggaran adat Dayak oleh pemerintah Orde Baru merupakan contoh nyata dari ketidakpedulian kelompok tertentu yaitu kelompok elit pemerintahan terhadap kelompok lain, dalam hal ini suku Dayak. Tanah bagi suku Dayak adalah tempat bernaung dan sumber kehidupan, yang kepemilikannya tidak ditentukan oleh sertifikat atau tanda kepemilikan formal

lainnya (Purwana, 2005). Kehidupan orang Dayak tidak dapat dilepaskan dari lingkungan alam terutama hutan. Mereka percaya bahwa tanah adalah a<sup>5</sup>ugerah Tuhan. Hasil adaptasi orang Dayak dengan hutan telah merasuk ke dalam struktur sosiokultural masyarakat Dayak sehingga ada pepatah mengatakan bahwa hutan merupakan jiwa dan darah orang Dayak (Petebang, dalam Purwana, 2005).

Setiap orang atau keluarga dalam suku Dayak mempunyai hak yang sama atas tanah mereka. Dengan sistem perladangan, maka kepemilikan tanah bersifat sementara. Setiap keluarga atau orang berhak membuka lahan baru atau mengolah bekas lahan orang lain dengan cara-cara tertentu. Sebelum menempati dan mengolah tanah yang dipilih, mereka memasang *sanghoya*, yaitu tanda larangan berbentuk silang yang didirikan di atas tanah, terbuat dari batang kayu (Purwana, 2005). Apabila *sanghoya* ter<sup>29</sup>ut dirusak, maka orang yang merusak akan dituntut sesuai dengan hukum adat yang berlaku.

Para pendatang dalam hal ini pemerintah dan juga para transmigran tidak mengindahkan hal-hal tersebut. Lahan hutan Kalimantan dibuka begitu saja karena dianggap tidak ada pemiliknya, lalu dilakukan sertifikasi kepemilikan, sehingga akhirnya suku Dayak tergusur dari tanah mereka. Permintaan masyarakat Dayak kepada pemerintah untuk tidak membuat area tertentu dalam hutan yang dianggap keramat sebagai kebun sawit diabaikan begitu saja. Dalam proses pembukaan lahan sering dengan sengaja jalan blok atau jalan poros yang dibangun perusahaan menerjang *tembawang*, yaitu kebun buah-buahan dan *pontok*, yaitu penanda tempat yang dianggap keramat. Dari kasus tersebut dapat dilihat bahwa pemerintah tidak perlu merasa menghormati, menghargai, dan menjaga harmoni dengan suku Dayak. Dalam hal ini suku Dayak dianggap sebagai orang-orang yang berada di luar kelompoknya (elit pemerintahan).

Fenomena ini cukup menjelaskan mengapa masyarakat Indonesia yang selama ini diyakini menjunjung tinggi harmoni dan toleransi, justru tidak pernah lepas dari konflik dan kekerasan. Dalam masyarakat

kolektif, adalah tabu berkonflik dengan anggota kelompoknya, tetapi tidak dengan orang-orang di luar kelompoknya, apalagi jika hal tersebut dilakukan untuk membela atau mempertahankan kehormatan. Nilai-nilai kolektifisme mentransformasikan kekayaan (keragaman) etnik, kultural, dan agama menjadi potensi konflik dan disharmoni secara global. Nampaknya hal inilah yang dipotret oleh Misrawi ("Toleransi versus", 2006) sebagai gejala sikap intoleran dan Dahana ("Mencari tradisi", 2006) sebagai mosaik Indonesia yang belum utuh, yaitu identifikasi berlebihan terhadap sebuah entitas yang unik seperti kesukuan, kepertaian, ataupun keagamaan.

#### **Ketidakadilan: Penguat Sentimen Kelompok dan Prasangka**

Kelemahan lain dari bangsa Indonesia adalah maraknya ketidakadilan. Sebagaimana terlihat dari kasus-kasus kekerasan dan konflik, ketidakadilan sering dilakukan oleh kelompok yang lebih mempunyai kuasa. Ketidakadilan juga dilakukan oleh kelompok mayoritas terhadap kelompok minoritas.

Konflik di Sampit merupakan salah satu contoh hasil dari ketidakadilan yang dilakukan oleh pemerintah terhadap suku Dayak di Kalimantan. Sejarah menunjukkan bahwa pemerintah dengan kekuasaannya menggusur penduduk Kalimantan dari tanah mereka dengan semena-mena ("Penderitaan panjang", 2001). Lahan yang menjadi sumber kehidupan mereka diambil alih oleh pemerintah tanpa ganti rugi yang sepadan. Suku Dayak yang mengandalkan ketrampilan *bahuma* yaitu bercocok tanam dengan sistem perladangan sangat tergantung pada hutan Kalimantan. Tanah bagi mereka benar-benar bermakna sebagai area tumbuhnya aneka tanaman pangan yang menopang kehidupan. Ketika pemerintah dengan paksa menggusur mereka, maka selain kehilangan tempat tinggal, mereka juga kehilangan sumber kehidupan. Dengan tidak memadainya keterampilan mereka untuk bekerja di sektor lain di luar perladangan, menyebabkan keterlibatan mereka di proyek pemerintah pun menjadi sangat terbatas. Untuk mencukupi tenaga kerja yang sesuai



kualifikasi, pemerintah mendatangkan orang-orang dari luar Kalimantan.

Transmigrasi besar-besaran orang-orang Jawa dan Madura ke Kalimantan merupakan upaya pemerintah untuk mengurangi kepadatan penduduk di kedua pulau tersebut, sekaligus memenuhi kebutuhan tenaga kerja di Kalimantan. Masuknya para transmigran ini semakin memperburuk kondisi di Kalimantan. Suku Dayak semakin terpinggirkan.

Inilah ketidakadilan yang dirasakan oleh penduduk asli Kalimantan yang pada akhirnya menimbulkan deprivasi relatif, yaitu perasaan frustrasi karena masyarakat Dayak memiliki atau memperoleh lebih sedikit dibandingkan dengan apa yang diperoleh oleh para pendatang (Runciman, 1966). Persepsi ketidakadilan tersebut menyebabkan semakin kuatnya ikatan emosional di antara orang-orang yang mengalami hal yang sama, dalam hal ini suku Dayak. Ikatan emosional ini semakin memperkuat identitas kesukuan mereka, prasangka, dan ketidaksukaan terhadap kelompok lain yang dirasakan merugikan mereka, dalam hal ini pemerintah dan transmigran.

Sebagai akibat dari orientasi budaya kolektif masyarakat Indonesia, baik disadari maupun tidak, para transmigran juga cenderung mengelompok dibandingkan membaaur dengan masyarakat Dayak. Pengelompokan ini semakin memperkuat batas antara *in-group* dan *out-group* yang pada akhirnya semakin mempertajam prasangka masyarakat Dayak.

#### Upaya Penyeragaman dan Tindakan Operasi

Upaya penyeragaman dan tindakan operasi pada zaman Orde Baru dengan kekuasaan absolutnya, di satu sisi memang meredam konflik, tetapi di sisi lain, mematikan pluralisme. Kebenaran hampir selalu diinterpretasikan bersifat tunggal, absolut dan mutlak. Berbagai konflik dinarasikan bahwa pihak yang menang dianggap selalu benar, sedangkan pihak yang kalah selalu dianggap salah (Wardaya, 2006). Apalagi jika kemenangan tersebut dilakukan atas nama kesatuan dan persatuan bangsa.

*"Dalam melihat berbagai konflik itu prinsip yang digunakan adalah 'karena mereka kalah, pasti mereka adalah pihak yang salah; sebaliknya, karena mereka menang, pasti mereka adalah pihak yang benar,' (Wardaya, 2006, h. 43).*

Menurut Wardaya (2006), tragedi 1965 merupakan salah satu contoh penggunaan prinsip kebenaran dalam konteks menang-kalah oleh pemerintah Orde Baru. Para korban tragedi tersebut dianggap salah karena buktinya mereka kalah, sedangkan pihak militer dianggap benar karena mereka terbukti menang (h. 43).

Upaya penyeragaman yang dilakukan oleh pemerintah Orde Baru, seperti membawa ritual-ritual dan seremonial Jawa dalam sistem pemerintahan (Pemberton, 1994) serta pemberlakuan UU No. 5 tahun 1979 tentang pemerintahan desa sehingga menghancurkan *Pela Gandong* di Ambon (Mallarangeng, 2007) dan otoritas ke-Temenggungan dalam kampung pada suku Dayak (Purwana, 2005) merupakan contoh lain dari tindakan intoleran terhadap multikulturalisme.

Sistem pemerintahan Orde Baru yang berlangsung selama 30 tahun tersebut memberikan model pada masyarakat Indonesia bahwa hanya ada satu kebenaran yang bersifat mutlak dan absolut. Penyeragaman terhadap keragaman yang sebenarnya merupakan tindakan intoleran dan pemaksaan kehendak, tidak lagi dipandang sebagai sesuatu yang salah. Masyarakat terlanjur belajar, bahwa hanya ada satu kebenaran, yaitu yang lebih berkuasa, dan yang menang. Oleh karena setiap kelompok merasa dirinya benar, maka mereka berpendapat pastilah kelompok lain yang salah. Kebenaran hanya dapat ditegakkan apabila pihak lain terbukti kalah. Inilah yang disebut sebagai perang kebenaran oleh Sumardjo (2006).

#### Membangun Kesamaan, Menghargai Perbedaan

Mempelajari kasus kekerasan dan konflik antar kelompok di Indonesia dapat ditarik suatu kesimpulan bahwa mengembangkan

identitas nasional saja tidaklah cukup. Ikatan sentimen pada masyarakat Indonesia yang multi etnis dan religi, lebih kuat untuk membentuk sebuah identitas kesukuan dan keagamaan dibandingkan Identitas Nasional. Kasus konflik antar pribadi atau kelompok yang akhirnya meluas ke seluruh wilayah Indonesia seperti konflik di Poso, kerusuhan anti Cina yang tak pernah padam, dan pertikaian di Sampit merupakan bukti kelemahan pengembangan identitas nasional sebagai pemersatu bangsa.

Menggunakan kerangka berpikir Arrow dan Sundberg (2004) tentang Identitas Internasional, maka penulis berpendapat perlunya pengembangan identitas yang lebih luas dari pada identitas nasional, yaitu Identitas Global. Identitas global ini bukan sekadar identitas lintas negara atau identitas jaringan personal.

Identitas lintas negara masih mengandung unsur-unsur identitas sosial berdasarkan kategorisasi tertentu, misalnya jenis kelamin, suku, orientasi seksual, agama, dan sebagainya (Arrow & Sundberg, 2004). Jadi meskipun identitas yang dimiliki oleh individu sudah lebih luas dari pada identitas nasional, tetapi identitas lintas negara ini masih potensial menimbulkan konflik. Identitas lintas negara ini masih mengandung unsur *in-group* dan *out-group*. Misalnya kasus perang Israel-Palestina maupun penghancuran *World Trade-Center* di Amerika Serikat, dapat memunculkan solidaritas di kalangan umat Islam maupun Kristiani terhadap pihak yang dianggap *in-group*-nya. Solidaritas yang diwarnai sentimen keagamaan ini potensial mempertajam konflik nasional, yaitu konflik antar agama di Indonesia.

Berbeda dengan identitas lintas negara, identitas jaringan personal terbentuk dari hubungan antar pribadi, misalnya keluarga, sahabat, rekan kerja, atau rekan bisnis. Identitas jaringan personal terbentuk karena masing-masing individu merasa terikat secara personal (Arrow & Sunberg, 2004). Keterbatasan identitas jaringan personal ini adalah bahwa rasa solidaritas yang muncul bukanlah terhadap seluruh umat manusia di dunia, tetapi lebih kepada orang yang dekat secara personal dan lingkungan sosial yang terkait dengannya. Misalnya rasa soliditas terhadap korban bencana - seperti gempa

bumi yang terjadi di Yogyakarta, 27 Mei 2006 - muncul karena ada yang mempunyai keluarga atau teman yang berdomisili di Yogyakarta.

Keterbatasan dari identitas lintas negara dan identitas jaringan personal adalah kedua identitas tersebut meskipun sudah bersifat internasional, tetapi masih berbasis pada *in-group*. Oleh karena itu masih mengandung potensi loyalitas pada kelompok dan prasangka terhadap orang-orang di luar kelompoknya. Penghargaan, toleransi, solidaritas, keadilan, dan kebenaran belum ditegakkan atas dasar kemanusiaan, tetapi masih didasarkan pada kelompokku dan bukan-kelompokku.

Identitas Global atau yang disebut sebagai *Global-Human Identity* oleh Der-Karabetian dan Balian atau *World-Mindedness* oleh Sampson dan Smith (Arrow & Sunberg, 2004) secara konseptual merupakan identifikasi terhadap semua orang di dunia, yang melampaui batas-batas kesukuan, keagamaan, kebangsaan, kenegaraan, dan ikatan personal. Dengan demikian tidak ada lagi batas antara saya dan kamu, kami dan kalian, *ingroup* dan *outgroup*. Secara esensial setiap orang akan dipersatukan dengan orang lain sebagai manusia (*as a human being*) dan oleh perasaan kemanusiaanya (*in his/her humanity*).

Gagasan ini sejalan dengan pendapat Roberston (dalam Wardaya, 2006) tentang globalisasi, yaitu suatu proses yang meliputi tahapan:

"(1) **individuasi**, yaitu redefinisi setiap individu sebagai keutuhan dan bukan hanya bagian kolektivitas lokal; (2) **sosietalisasi**, yakni terbentuknya negara kebangsaan moderen sebagai suatu bentuk masyarakat nasional; (3) **internasionalisasi** atau pelipatgandaan interdependensi antar-negara; (4) **humanisasi**, yaitu terbentuknya pandangan bahwa bangsa manusia tidak dapat dibeda-bedakan atas dasar suku bangsa, kelas, gender (dsb) dalam hal hak-haknya sebagai manusia" (h. 26).

Dari pernyataan Roberston tersebut nampak bahwa sebenarnya globalisasi menghendaki setiap individu tidak



hanya mengembangkan kesadaran dan mengacu pada diri sendiri atau masyarakat nasionalnya, melainkan harus bergerak ke luar negaranya, dan meyakini nilai-nilai yang universal. Dengan demikian setiap orang akan mengembangkan sikap hormat dan toleransi yang luas. Penghargaan terhadap orang lain bukan didasarkan pada kelompokku dan bukan-kelompokku, tetapi lebih pada menghargai manusia dengan keseluruhan kemanusiaannya. Kebenaran tidak lagi didasarkan pada paradigma menang-kalah, tetapi lebih didasarkan pada upaya mempelajari dan memahami kebenaran lain sembari mengevaluasi kebenaran yang diyakini. Inilah yang disebut sebagai kebenaran paradoks oleh Sumardjo (2006). Dengan demikian akan terwujudlah sikap terbuka terhadap aneka perbedaan dan multi kebenaran.

Membangun kesamaan di sini berarti dipersatukan dengan orang lain sebagai manusia dan oleh perasaan kemanusiaannya. Tidak menyeragamkan, berarti setiap orang mampu menghargai orang lain dengan keunikannya masing-masing. Sehingga setiap orang akan mengembangkan sikap hormat dan toleransi yang luas. Dengan demikian *Bhinneka Tunggal Ika*, bukanlah sekadar semboyan penghias Bangsa.

### Langkah Nyata Membangun Identitas Global

Ada banyak upaya yang dapat dilakukan untuk membangun identitas global. Pertama, pemerintah harus mau mengubah paradigma kepemimpinan yang bersifat menang-kalah, opresif, dan mengabaikan perbedaan kultural. Dengan demikian demokrasi di Indonesia benar-benar dapat dijalankan. Pemerintah harus mampu menjalankan fungsi legislatif, eksekutif, dan yudikatifnya. Sehingga benar-benar mampu meningkatkan kesejahteraan dan mengayomi rakyat, serta menegakkan keadilan. Segala tindakan ketidakadilan yang bersifat opresif dan dapat menyulut konflik antar kelompok harus selalu dicermati dan diwaspadai.

Kebijakan-kebijakan dan keputusan yang diambil pemerintah pusat hendaknya memperhatikan kearifan lokal dan berbasis

pada kebutuhan rakyat. Dikeluarkannya PP No. 37/2006 masih menunjukkan bahwa pemberantasan korupsi, pengayoman terhadap yang lemah, dan pemberdayaan masyarakat belum menjadi komitmen bersama untuk dijalankan. Prasajo (2007) menyatakan bahwa jika benar-benar ingin melakukan perubahan masyarakat yang lebih baik dan menuju demokrasi lokal yang sehat, maka menjadi anggota Dewan hendaknya dipandang sebagai sebuah kehormatan yang seharusnya dijalankan tanpa pamrih. Komitmen dan spirit anggota adalah perubahan masyarakat yang lebih baik.

Kedua, pemerintah harus benar-benar melihat akar konflik. Seyogyanya pemerintah tidak hanya menyelesaikan konflik antara pihak-pihak yang bertikai saja. Konflik yang terjadi di negeri ini pada umumnya disebabkan oleh perebutan sumber-sumber ekonomi dan politik (Khamamizada, 2007) yang akhirnya mempertajam prasangka antar suku, ras, dan agama. Kerusuhan anti Cina, konflik suku Dayak dan Madura di Kalimantan, serta konflik antara PT *Freeport* Indonesia dengan penduduk Papua, merupakan bukti sejarah yang mengindikasikan adanya ketidakadilan ekonomi dan politik.<sup>28</sup>

Ketiga, dialog antara pemerintah pusat dan daerah, antara pemerintah dan rakyat, antar etnis, dan antar agama harus selalu dilakukan dan dipelihara secara terus-menerus. Dengan demikian akan selalu terjalin hubungan yang didasarkan pada rasa saling memahami, mempercayai, dan bersih dari prasangka. Khamamizada (2007) mengemukakan adanya dua macam pendekatan, yaitu struktural-elitis dan kultural populis. Pendekatan struktural-elitis, yaitu menarik aktor-aktor perdamaian melalui tokoh-tokoh agama, pejabat, pemimpin politik, dan pejabat negara. Strategi ini sangat berguna dalam membangun opini publik tentang pentingnya perdamaian di masyarakat. Pendapat kaum elite ini biasanya akan disebarluaskan ke umat, jemaah, rakyat atau pengikutnya. Pendekatan<sup>2</sup> kultural-populis dilakukan dengan cara menarik aktor-aktor perdamaian dari bawah dengan membangun kesadaran pentingnya perdamaian bagi relasi sosial yang mereka hadapi di masyarakat plural.

Keempat, dalam era globalisasi baik pemerintah, masyarakat, maupun individu

sebagai pribadi hendaknya tidak hanya mengikutiarus yang ditimbulkannya (Wardaya, 2006). Misalnya: (1) dalam membina kerja sama internasional, pemerintah hendaknya tetap berpegang pada prinsip bahwa bekerja sama merupakan sarana membina saling ketergantungan yang berbasis kemanusiaan; dengan demikian janganlah melakukan praktek-praktek yang bersifat mencari keuntungan di atas penderitaan rakyat; upaya-upaya menjalin kerja sama yang didasari sikap demi kepentingan kelompok tertentu dengan menghalalkan segala cara harus dihentikan; (2) sebagai pribadi, seseorang jangan hanya mengikuti *trend mode*, kemajuan teknologi, dan terseret arus komunikasi global yang mengakibatkan dirinya kehilangan nasionalisme, jati diri, bahkan rasa kemanusiaannya. Era globalisasi sebaiknya dijadikan sarana untuk meningkatkan kesadaran akan pentingnya humanisasi, yaitu interaksi saling ketergantungan yang didasarkan pada kemanusiaan yang melintas batas kenegaraan, kesukuan, kelas, dan lain sebagainya.

Kelima, dunia pendidikan dapat lebih berperan dengan memberikan kesempatan kepada anak didik untuk bersentuhan dengan aneka keyakinan<sup>23</sup>, budaya, dan kebenaran. Persinggungan tersebut dapat dilakukan secara langsung maupun tidak langsung.

Persinggungan langsung dilakukan dengan cara memberikan kesempatan pada peserta didik untuk hidup dan berdialog dengan orang-orang yang mempunyai latar belakang berbeda. Materi pelajaran yang berbasis realitas kehidupan yang dialami peserta didik sehari-hari merupakan sarana yang baik untuk meningkatkan kompetensi peserta didik. Dengan demikian peserta didik akan benar-benar mampu belajar hidup berdampingan dengan orang lain yang mempunyai aneka perbedaan, mampu mengembangkan sikap toleransi, serta

mampu memecahkan masalah yang berkaitan dengan konflik budaya dan kebutuhan. Mengajak peserta didik untuk membantu orang lain tanpa mempedulikan suku, agama, dan kelompok merupakan sarana yang baik untuk membangun rasa kemanusiaan.

Persinggungan tidak langsung adalah melalui bacaan-bacaan atau literatur. Penyediaan bacaan yang memuat kekayaan budaya Indonesia dan keragaman agama merupakan sarana memperluas wawasan peserta didik. Model pembelajaran dititik beratkan pada diskusi yang berbasis bacaan dan pengalaman sehari-hari. Peserta didik diberi kesempatan untuk melakukan multi interpretasi dan memahami cara pandang orang lain. Model pembelajaran yang inovatif harus menjadi tekanan karena dapat mendorong peserta didik menggali kebenaran yang tak berkesudahan. Pembelajaran yang hanya bersifat dogmatis berupa ceramah dan akumulatif yang berupa hafalan atau pengumpulan informasi sebaiknya tidak dijadikan fokus. Pendidikan juga sebaiknya jangan digunakan sebagai sarana untuk menyampaikan ideologi, yang ditunggangi oleh kepentingan kelompok tertentu. Pemberangusan intelektual dan pembodohan peserta didik harus segera ditinggalkan.

Keenam, media masa sebagai sarana pendidikan masyarakat harus jujur dan berpijak pada kebenaran fakta dalam menampilkan informasi. Media masa sebaiknya tidak berat sebelah dan menjadi alat kelompok tertentu. Orientasi kemanusiaan dan penegakan kebenaran haruslah menjadi fokus pemberitaan. Dengan demikian media masa dapat berfungsi secara benar sebagai sarana pembelajaran masyarakat. Media masa harus berhati-hati terhadap segala pemberitaan yang menyesatkan, bersifat stereotipikal terhadap kelompok tertentu, meningkatkan prasangka, dan dapat memperuncing konflik.

#### DAFTAR PUSTAKA

<sup>4</sup> Arrow, H. & Sunberg, N.D. (2004). International identity: Definitions, development, and some implications for global conflict and peace. Dalam B.N. Setiadi, A. Supratiknya,

W.J. Lonner, & Ype H. Poortinga. (Eds.), *Ongoing themes in psychology and culture*. Yogyakarta: International Association for Cross-Cultural Psychology.



- Subianto, Benny (2007, 8 Januari). Jangan sama ratakan kelompok etnis. *PERSPEKTIF BARU*. Diunduh tanggal 15 Desember 2006 dari <http://www.perspektifbaru.com/wawancara/565>
- Dahana, Radhar Panca. (2006, 16 Juni). Mencari Tradisi dalam Diri. *KOMPAS*, h. 52
- Dari mana datangnya rusuh Sampit? (2004, 12 Mei). *tempointeraktif*. Diunduh tanggal 11 Desember 2006 dari <http://www.tempointeraktif.com/hg/2004/05/12/tml.20040512-0>.
- Hofstede, G. & Hofstede, G.J. (2005). *Cultures and organizations: The software of the mind*. New York: McGraw-Hill.
- Khamamizada. (2007, 2 Februari). Aktor dan jaringan perdamaian. *KOMPAS*, h. 6
- Laporan hasil pemantauan konflik di Aceh: 1 Agustus - 31 Agustus (2005). *Decentralization Support Facility*
- Mallarangeng, Andi. (2007, 31 Januari). Konflik Poso pasca Deklarasi Malino. *Jaringan Islam Liberal*. Diunduh tanggal 5 Februari 2007 dari <http://islamlib.com/index.php?page=article&id=189>.
- Manan, Abdul. (2004, 29 April). Kronologi konflik di Maluku. *tempointeraktif.com*. Diunduh tanggal 15 Desember 2006 dari <http://www.tempointeraktif.com/hg/2004/04/29/tml.20040429-0>
- Mencari solusi permusuhan panjang. (2001, Edisi Maret-April). *ELSAM*. Diunduh 15 Desember 2006 dari [http://www.elsam.or.id/txt/asasi/2001\\_0304/03.html](http://www.elsam.or.id/txt/asasi/2001_0304/03.html)
- Misrawi, Zuhairi. (2006, 16 Juni). Toleransi versus intoleransi. *KOMPAS*, h. 6
- Pemberton, J. (1994). *Jawa*. Yogyakarta: Mata Bangsa.
- Penderitaan panjang suku Dayak. (2001, Edisi Maret-April). *ELSAM*. Diunduh tanggal 15 Desember 2006 dari [http://www.elsam.or.id/txt/asasi/2001\\_0304/04.html](http://www.elsam.or.id/txt/asasi/2001_0304/04.html)
- Puluhan eks laskar jihad bergerak ke Poso. (2007, 31 Januari). *mediaindonesia.com*. Diunduh tanggal 15 Desember 2006 dari <http://www.mediaindonesia.com/berita.asp?id=123587>
- Purwana, B.H.S. (2005). Babad Babat Sawit di (Hutan) Kalimantan Barat. Dalam B. Susanto (Ed.), *Ingat(!)an: Hikmat Indonesia masa kini, hikmat masa lalu rakyat*. Yogyakarta: Kanisius.
- Prasojo, Eko. (2007, 2 Februari). Mencermati rasi PP No. 37/2006. *KOMPAS*, h. 6
- Runciman, W.G. (1966). *Relative deprivation and social justice*. Berkeley: University of California Press.
- Shanty. (2007, 29 Januari). Polisi ungkap 32 kasus kekerasan di Poso. *Mediaindonesia.com*. Diunduh tanggal 15 Desember 2006 dari <http://www.mediaindonesia.com/berita.asp?id=123270>
- Setiadi, B.N., Supratiknya, A., Lonner, W.J., & Poortinga, Ype H. (2004). *Ongoing themes in psychology and culture*. Yogyakarta: International Association for Cross-Cultural Psychology.
- Silalahi, Levi. (2004<sup>a</sup>, 12 Mei). Republik Maluku Selatan dari masa ke masa. *tempointeraktif.com*. Diunduh tanggal 15 Desember 2006 dari <http://www.tempointeraktif.com/hg/narasi/2004/05/12/nrs.20040512-0>
- Silalahi, Levi. (2004<sup>b</sup>, 12 Mei). Poso, enam tahun dirundung duka. *tempointeraktif.com*. Diunduh tanggal 15 Desember 2006 dari <http://www.tempointeraktif.com/hg/2004/05/12/tml.20040512-0>
- Sumardjo, Jakob. (2006, 26 Agustus). Kebenaran itu paradoks. *KOMPAS*, h. 6
- Susanto, B. (2004). *Ingat(!)an: Hikmat Indonesia masa kini, hikmat masa lalu rakyat*. Yogyakarta: Kanisius.
- Triandis, H.C., Bontempo, R., & Villareal, M.J. (1988). Individualism-collectivism: Cross-cultural perspective on self-in-group relationship. *Journal of Personality and Social Psychology*, 54(2), 323-338.
- Triandis, H.C. (1994). *Culture and social behavior*. New York: McGraw-Hill.



16  
Triandis, H.C. (1999). Cross-cultural psychology. *Asian Journal of Social Psychology*, 2, 127-143.

Indonesia. Yogyakarta: Universitas Sanata Dharma.

15  
Wardaya, B.T. (2006). *Cerdas dan humanis: Menimbang sumbangan Universitas Sanata Dharma bagi pendidikan di*

Alamat e-mail: [datu3@yahoo.com](mailto:datu3@yahoo.com)

# Identitas Global : Membangun Kesamaan Tanpa Menyeragamkan

## ORIGINALITY REPORT

13%

SIMILARITY INDEX

13%

INTERNET SOURCES

4%

PUBLICATIONS

3%

STUDENT PAPERS

## PRIMARY SOURCES

1

[repository.uinjkt.ac.id](http://repository.uinjkt.ac.id)

Internet Source

2%

2

[danielpinem.wordpress.com](http://danielpinem.wordpress.com)

Internet Source

1%

3

[jurnal.himpsi.or.id](http://jurnal.himpsi.or.id)

Internet Source

1%

4

[ijoc.org](http://ijoc.org)

Internet Source

1%

5

[www.ireyogya.org](http://www.ireyogya.org)

Internet Source

1%

6

[www.bloggermania.org](http://www.bloggermania.org)

Internet Source

1%

7

[groupsandwar.uoregon.edu](http://groupsandwar.uoregon.edu)

Internet Source

<1%

8

[issuu.com](http://issuu.com)

Internet Source

<1%

9

[www.historia.co.id](http://www.historia.co.id)

Internet Source

<1 %

10

[karsa.stainpamekasan.ac.id](http://karsa.stainpamekasan.ac.id)

Internet Source

<1 %

11

[anzdoc.com](http://anzdoc.com)

Internet Source

<1 %

12

[orientasibaru.net](http://orientasibaru.net)

Internet Source

<1 %

13

[portal.sarapanpagi.org](http://portal.sarapanpagi.org)

Internet Source

<1 %

14

[sk.sagepub.com](http://sk.sagepub.com)

Internet Source

<1 %

15

[documents.mx](http://documents.mx)

Internet Source

<1 %

16

[tesis.pucp.edu.pe](http://tesis.pucp.edu.pe)

Internet Source

<1 %

17

[www.sinarharapan.co.id](http://www.sinarharapan.co.id)

Internet Source

<1 %

18

[repository.usd.ac.id](http://repository.usd.ac.id)

Internet Source

<1 %

19

[www.acheh-eye.org](http://www.acheh-eye.org)

Internet Source

<1 %

20

[himpsi.or.id](http://himpsi.or.id)

Internet Source

<1 %



21	<a href="http://fromblazertodaster.blogspot.com">fromblazertodaster.blogspot.com</a> Internet Source	<1 %
22	<a href="http://repository.unair.ac.id">repository.unair.ac.id</a> Internet Source	<1 %
23	<a href="http://repo.iain-tulungagung.ac.id">repo.iain-tulungagung.ac.id</a> Internet Source	<1 %
24	<a href="http://jogja.linux.or.id">jogja.linux.or.id</a> Internet Source	<1 %
25	<a href="http://www.tempointeractive.com">www.tempointeractive.com</a> Internet Source	<1 %
26	<a href="http://mybrigaspad.blogspot.com">mybrigaspad.blogspot.com</a> Internet Source	<1 %
27	<a href="http://works.bepress.com">works.bepress.com</a> Internet Source	<1 %
28	<a href="http://iptek.its.ac.id">iptek.its.ac.id</a> Internet Source	<1 %
29	<a href="http://asyraafahmadi.com">asyraafahmadi.com</a> Internet Source	<1 %
30	<a href="http://www.beritaindonesia.co.id">www.beritaindonesia.co.id</a> Internet Source	<1 %

Exclude bibliography On